

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “KEPENTINGAN AUSTRALIA MENYETUJUI *PROGRAM INTERFAITH DIALOGUE* DENGAN INDONESIA ” yaitu :

Pertama, penulis tertarik dengan tema Interfaith Dialogue, yang merupakan dialog antar negara-negara mengenai berbagai bidang, agama, sosial, budaya, sebagai dampak adanya peristiwa teror WTC (World Trade Centre) pada 11 September.

Kedua, penulis ingin mengetahui tentang kepentingan Australia bekerjasama dengan Indonesia melalui event tersebut.

Ketiga, penulis melihat bahwa hubungan Australia dengan Indonesia kerap kali mengalami pasang surut dan ketegangan akibat berbagai hal, maka dari itu penulis ingin mengetahui apakah Interfaith Dialogue cukup efektif sebagai sarana bagi keharmonisan hubungan Australia dengan Indonesia.

Keempat, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bentuk-bentuk kerjasama Interfaith Dialogue antara Australia dengan Indonesia serta keuntungannya bagi

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan kepentingan Australia menyetujui kerjasama program interfaith dialog dengan Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa penting program Interfaith Dialog sebagai sarana hubungan bilateral Australia-Indonesia
3. Dengan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berbagai pengetahuan kepada yang membutuhkan informasi tentang Hubungan Australia-Indonesia melalui Interfaith Dialog.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para penstudi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional.
6. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dan para pengambil kebijakan.
7. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Negara lain, suatu Negara tentu mempunyai tujuan yang menjadi dasar bagi Negara tersebut untuk melakukan kerjasama. Dalam arti ada suatu kepentingan dalam suatu hubungan antar Negara tersebut. Kepentingan tersebut menyangkut ketahanan nasional yang meliputi berbagai bidang ; ideologi, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Dalam menjalin kerjasama dengan Negara lain, suatu Negara perlu melakukan upaya diplomasi sebagai usaha dalam memperjuangkan kepentingannya. Diplomasi merupakan sebuah seni dalam mengedepankan kepentingan dalam hubungannya dengan Negara lain.¹ Salah satu bentuk dari diplomasi tersebut adalah diplomasi kebudayaan, yang masih termasuk dalam jenis *soft diplomacy*², merupakan hal yang baru bagi hubungan diplomasi politik luar negeri Negara-negara sedang berkembang.³

Begitu juga halnya dengan Australia yang melakukan kerjasama Bilateral *Interfaith Dialogue* dengan Indonesia. Bukan tanpa maksud dan tujuan Australia ikut serta dalam forum dialog antar negara mengenai agama, budaya, dan sosial yang salah satu penggagasnya adalah Indonesia, yang merupakan suatu program yang dilakukan dengan berbagai negara termasuk Australia dan Indonesia.

Australia atau Negara Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia) adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama

¹ KM.Panikkar, *The Principle and Practice of Diplomacy* dalam Diplomasi terjemahan Harwanto Dahlan dan Mirsawati, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal.3

² *Soft Diplomacy* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang anda inginkan melalui daya tarik dari pada pemaksaan. Joseph.S Nye, <http://www.futurecasts.com/book%20review%206-4.htm>

³ Tulus Warsito&Wahyuni Kartika Sari, *Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansinya Bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia*. Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 1

benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Negara tetangga Australia disebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Disebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (secara administratif milik Perancis), sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru.⁴

Indonesia adalah salah satu Negara tetangga Australia yang terdekat. Sebagai Negara yang dekat secara geografis, sudah pasti sering terjadi permasalahan dan ketegangan hubungan antar kedua negara. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Persamaan antara hewan dan tanaman yang ada di Australia, Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi merupakan bukti adanya hubungan tersebut. Juga terdapat hubungan sosial dan budaya.

Hubungan bilateral Australia dan Indonesia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan mencolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

Perbedaan yang cukup mencolok tampak pada total jumlah penduduk. Saat ini, penduduk Negeri Kanguru tersebut berjumlah sekitar 22 juta jiwa. Disamping itu Australia tidak mempunyai agama negara yang resmi dan masyarakat bebas

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Australia diakses 23 Oktober 2010.

menganut segala agama yang mereka pilih, sepanjang mereka patuh pada hukum. Penduduk Australia juga bebas untuk tidak memeluk agama. Agama Hindu menempati urutan pertama terbesar dalam pertumbuhan antara agama-agama di Australia. Agama Budha menempati urutan kedua terbesar, sedang agama Islam ketiga. Pertumbuhan agama-agama itu terekam dalam lima tahun terakhir sejak 2001 sampai 2006.⁵

Secara umum Australia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen, dengan sekitar 64 persen penduduk Australia mengaku sebagai penganut agama Kristen. Namun, agama-agama besar lainnya juga memiliki penganut, yang mencerminkan masyarakat Australia yang majemuk secara budaya. Agama atau aliran kepercayaan Australia paling awal mulai dengan Penduduk Aborijin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, yang telah mendiami Australia selama antara 40.000 dan 60.000 tahun.⁶

Sensus 2001 menyatakan bahwa 68% orang Australia menyebut diri sebagai Kristen : 27% menyebut diri sebagai Katolik Roma dan 21% sebagai Anglikan. Orang Australian yang bukan beragama Kristen ialah 5%. Jumlah dari 16% dikelompokkan "Tak Beragama" (yang termasuk kepercayaan non-teistik seperti humanisme, ateisme, agnostisisme dan rasionalisme) dan 12% berikutnya menolak menjawab atau tak memberi tanggapan yang cukup penafsiran.⁷

Sedangkan Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://smaratungga.wordpress.com/2007/11/24/perkembangan-agama-di-australia>, diakses 23 oktober

penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa⁸. Dengan perbedaan suku, adat istiadat, budaya dan yang paling menonjol adalah perbedaan keyakinan. Dimana Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Yang didalamnya tak jarang terjadi konflik antar agama yang terjadi di Indonesia. seperti yang pernah terjadi konflik di Poso dan Ambon.

Tidak dipungkiri, perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewarnai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang. Adalah naif, jika ada yang berpendapat bahwa pada suatu titik hubungan kedua negara akan tercipta sedemikian rupa sehingga terbebas dari masalah. Sebaliknya data empiris menunjukkan bahwa hubungan kedua negara memiliki kecenderungan yang sangat fluktuatif, sehingga para pemimpin serta masyarakat kedua negara dituntut untuk selalu siap dengan berbagai solusi menghadapi setiap masalah yang muncul.⁹

Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia memang menarik untuk dicermati karena mempunyai keunikan dan spesifikasi tersendiri. Indonesia adalah Negara tetangga terdekat Australia. Letak Geografis telah menempatkan Indonesia berhimitan dengan Negara sebesar benua itu. Indonesia merupakan Negara terbesar diwilayah Asia tenggara. Baik Australia maupun Indonesia sama-sama termasuk dalam kawasan Asia Pasifik. Ironisnya, hubungan kedua Negara bertetangga dekat ini selalu diwarnai oleh konflik dan ketegangan. Tampaknya

⁸ <http://amirbuton.wordpress.com/2010/08/17/jumlah-penduduk-hasil-sensus-penduduk-tahun-2010/>
diakses 23 Oktober 2010

⁹ <http://kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm>. diakses 23 Oktober 2010

tidak mudah untuk menegakkan hubungan harmonis keduanya. Berbagai kerikil sandungan atau ganjalan selalu muncul dan berpengaruh pada kedua Negara.

Dalam perkembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa yang memperburuk hubungan Australia dengan Indonesia. Perbedaan budaya dan kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua negara sangat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak. Situasi yang demikian yang menyebabkan Australia harus berhubungan dengan Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya karena didorong oleh berbagai kepentingan Australia dan Indonesia saling menjalin kerjasama. Hubungan Australia dan Indonesia mengalami pasang surut yang diwarnai oleh ketegangan yang sempat terjadi.¹⁰

Sebelumnya hubungan kedua Negara juga telah kerap diwarnai oleh berbagai gejolak dan kesus-kasus krusial. Ketegangan hubungan Australia-Indonesia pasca pemberian visa proteksi sementara kepada 42 warga Papua sempat menjadi polemik.¹¹

Saat ini, paling tidak terdapat dua isu yang memerlukan perhatian khusus pemerintahan kedua negara, yaitu ancaman terorisme dan imigran gelap. Ancaman terorisme sejauh ini telah berhasil dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama, antara lain dengan penandatanganan 'Memorandum of Understanding on Counter Terrorism' yang antara lain meliputi kegiatan tukar-menukar informasi intelijen, menghidupkan kembali kerjasama dan pengembangan kemampuan antara agen penegak hukum. Bahkan pada bulan Februari 2004, Indonesia dan

¹⁰ <http://www.sejarah-agustinus.blogspot.com/2010/04/hubungan-australia-indonesia.html>, diakses 23 Oktober 2010

¹¹ <http://www.indosiar.com/fokus/08-04-06/polemik-hubungan-indonesia---australia>, diakses 23

Australia bersama-sama menyelenggarakan 'Ministerial Conference on Counter Terrorism' yang dihadiri para menteri negara-negara kawasan. Salah satu hasil konkret yang disepakati adalah pendirian 'Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation' (JCLEC) yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional para petugas penegak hukum di kawasan guna memerangi transnational crime, khususnya terorisme.¹²

Kerap kali hubungan antar Negara tersebut mengalami pasang surut. Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia sempat terasa pasca bom Bali yang menewaskan 88 orang warga Australia, serta bom di kedutaan besar Australia di Jakarta. Ketegangan ini dipicu oleh arogansi yang ditunjukkan polisi Australia yang diizinkan berada di Bali dalam upaya turut mengungkap tragedi Bali.¹³

Bahkan puncak ketegangan pasca bom Bali II, Australia mengeluarkan *Travel Warning* atau larangan berkunjung kepada warga negaranya ke Indonesia dengan alasan ancaman teroris. Pemerintah Indonesia menilai, hal tersebut sangatlah wajar terjadi, karena Australia ingin melindungi warga negaranya.¹⁴ Dampak lain yang timbul bagi Indonesia adalah menurunnya angka kunjungan wisatawan mancanegara secara drastis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali pasca bom Bali 2005.

Di dunia Internasional Australia ikut campur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hal ini merupakan wujud perhatian politik luar negeri

¹² <http://kbri-canberra.org.au/speeches/2004/04/206civitas.htm>, diakses 23 Oktobe 2r010

¹³ Gatra.com Nomor 52, *Indonesia-Australia Pasca-Bom Bali*. Jakarta, 14 November 2002

¹⁴ <http://dasarhali.wordpress.com/2008/11/13/mengapa-wisatawan-australia-tetap-ke-bali-pasca->

Australia dibawah pimpinan PM Chifley dan antusiasme yang ditunjukkan oleh menteri luar negerinya, Dr. H.V. Evatt. Dalam hal lain, Pemerintah Australia sangat menginginkan Irian Barat tetap dikuasai Belanda, pernyataan ini bukan tanpa alasan yang mendasar dikarenakan setelah invasi Jepang ke kepulauan New Guinea menjelang PD II maka tidak mungkin bahwa masyarakat dan pemerintahan Australia merasa yakin bahwa Irian Barat sangat penting bagi Australia, dari situlah hubungan antara Australia dengan Indonesia mengalami pasang surut akibat dari masalah Irian Barat. Di satu sisi Indonesia sangat menginginkan Irian Barat menjadi propinsi Indonesia. Antara tahun 1950-1962 pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, dengan jalan pasukan militer dikerahkan untuk menguasai Irian Barat dan memukul mundur Belanda dari Irian Barat.

Upaya pemerintah kedua negara untuk memperbaiki hubungan, kerap kali terganjal masalah-masalah baru. Kendati telah mereda kasus Timor Timur yang kemudian melepaskan diri dari wilayah RI dan menjadi Negara Timor Leste yang seringkali menjadi pemicu masalah kedua Negara, namun belakangan tetap timbul masalah-masalah lainnya. Sejak lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, pemerintah kedua negara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketegangan hubungan yang ditimbulkan dari 'campur tangan' Australia di bekas propinsi ke-27 Indonesia tersebut, dalam rangka mencapai suatu tahapan hubungan yang sehat, dewasa, dan berkesinambungan. Buah kerja keras ini ditandai oleh kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Australia, bulan Juni 2001 yang diikuti oleh kunjungan Perdana Menteri John Howard ke Indonesia

bulan Agustus 2001. Pada kesempatan kedua kunjungan tersebut, kedua belah pihak menggarisbawahi pentingnya membangun rasa saling percaya dan saling pengertian serta mengembangkan dialog guna memperkuat ikatan antar dua bangsa. Kedua pemimpin juga menegaskan kembali keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan melalui berbagai kerjasama di berbagai bidang.

Salah satu kekompakan Australia dan Indonesia adalah ketika stabilitas keamanan Dunia Internasional terguncang akibat aksi teror bom menara WTC di Amerika Serikat yang terjadi pada 11 September 2001 yang mengatasnamakan agama tertentu. Bagi Indonesia, aksi tersebut tentu sangat menyudutkan terlebih Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim dunia terbanyak. Australia sebagai negara yang bukan mayoritas muslim pun juga ikut mengecam aksi teror tersebut.

Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia terus mengalami peningkatan lewat sejumlah kontak antarmenteri yang telah diselenggarakan di Bali, Perth, Singapura, Canberra, Sulawesi Selatan, dan saat ini di Sydney. Perbaikan hubungan bilateral seperti lewat pengesahan Traktat Lombok awal tahun lalu di Perth mengingatkan Australia dan Indonesia yang mungkin tetap dihadapkan perbedaan pandangan yang tidak sampai mengguncang pondasi hubungan bilateral.¹⁵

Terlepas dari masalah-masalah yang mengandung potensi konflik di atas, hubungan antara kedua masyarakat dalam berbagai bidang tetap tinggi, seperti dalam bidang pendidikan, budaya, dan perdagangan. Hal tersebut merupakan aset

¹⁵http://internasional.kompas.com/read/2009/02/20/12143157/Ancaman_terhadap_Hubungan_Australia

penting dalam hubungan kedua negara yang perlu terus dipupuk dan dikembangkan, sehingga diharapkan akan memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan kedua negara.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kedua Negara untuk terlepas dari potensi-potensi konflik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program kegiatan Interfaith Dialog. Upaya bersama Australia dan Indonesia untuk saling tukar para pemimpin akar rumput, termasuk para pemimpin agama, telah dirintis beberapa tahun terakhir ini. Prakarsa untuk menyelenggarakan 'interfaith dialogue', Yogya 6 - 7 Desember 2004 yang lalu, yang melibatkan para pemimpin agama negara-negara ASEAN, Australia, New Zealand, Papua Nugini, dan Timor Leste.¹⁶

Interfaith yang dikembangkan oleh Dr. N. Hasan Wirajuda ketika masih menjadi Menteri luar negeri Indonesia, masih cukup baru, dan memiliki kaitan erat dengan sentimen global yang dipicu oleh peristiwa 11 September pada tahun 2001 ketika terjadi serangan teroris pengeboman menara WTC di Amerika Serikat, dimana peta politik global memang menjadi berubah dan seakan-akan membenarkan tesis Huntington mengenai benturan peradaban antara Barat dengan Islam.¹⁷ Dimana aksi terror 11 september tersebut mengatasnamakan agama tertentu dalam berjihad, yakni agama Islam. Umat muslim terpojok pada saat itu, karena ulah segelintir mereka yang beridealisme radikal. Dan dunia internasional mengecam aksi radikal pada 11 september tersebut.

¹⁶ <http://kbi-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm>, diakses 25 Oktober 2010

Interfaith Dialogue yang dirancang dan dikembangkan oleh menteri Luar Negeri Indonesia Dr. N. Hasan Wirajuda dan kemudian diteruskan oleh Menteri luar negeri Indonesia Marty Natalegawa sekarang ini, diharapkan dapat terhindar dari potensi-potensi konflik yang bisa saja terjadi dan bisa mengganggu keharmonisan hubungan Australia-Indonesia.¹⁸

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah :

Mengapa Australia menyetujui program Interfaith Dialog dengan Indonesia?

E. Landasan Teoritik

Melihat permasalahan di atas penulis akan mencoba mendeskripsikannya dengan menggunakan konsep dan teori. Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹⁹ Sedangkan teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan. Teori merupakan suatu bentuk pertanyaan yang menjawab pertanyaan "mengapa", artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.²⁰

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk pokok permasalahan diatas adalah Teori Aktor Rasional dan Konsep Strategi.

1. Teori Aktor Rasional

Menurut Graham T Allison²¹, Teori atau model actor rasional ini mendasarkan pada gagasan adanya rasionalitas komprehensif dari perilaku ideal, artinya mencari pilihan alternative yang paling ideal. Dengan kata lain memutuskan suatu kebijakan yang paling optimum dalam artian pada hubungan sarana dan tujuannya. Dalam model ini, yakni aktor rasional, dipandang sebagai akibat tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit,

¹⁹ Mohtar Mas'ood. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 93.

²⁰ Ibid, Hal 185

²¹ Graham T. Allison, *Essence of decision (Little brow 71) " conceptual model's and the Cuban missile crisis "*. American political science review (sept 69) dan Allison and Morton halperin, " *bureaucratic politics " a paradigm and some policy implication " world politics, vol 24 1972*

yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Proses pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.

Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang berakar dan terkoordinasi. Dalam model ini digambarkan bahwa pembuat keputusan dalam melakukan alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria “ optimalisasi hasil ”. Para pembuat keputusan ini digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Model ini sering diterapkan untuk mendeskripsikan politik luar negeri.

Unit analisis model pembuat keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atau masing-masing alternatif itu.

Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa pemerintah Australia akan mendapatkan banyak keuntungan dari event Interfaith Dialogue yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, dengan harapan dapat mengoptimalkan hasil dan tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Australia dalam berbagai bidang mengingat Indonesia adalah sebagai Negara tetangga Australia yang dekat letaknya secara geografis.

2. Konsep Strategi

Menurut Alfred Chandler, strategi adalah :

“ The determination of the basic long-term goals and the objectives of an enterprises, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals.” “Menentukan tujuan yang paling mendasar dalam waktu yang relatif lama dari sebuah perusahaan, dan mengadopsi serta mengalokasi sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tersebut.” Menurut James Brian Quin, strategi adalah *“The pattern or plane that intergrates an organization’s major goals, and policies.”* Pola atau rencana yang mengintegrasikan suatu tujuan utama dalam sebuah organisasi, dan kebijakan.²²

Menurut William F. Glueck, strategi adalah *“ A unified, comprehensive, and intregated plan designed to ensure that the basic objectivies of the enterprises are achieved.”* Satu kesatuan, menyeluruh, dan mnegintegrasikan suatu rencana dengan maksud untuk memastikan bahwa tujuan dari suatu perusahaan itu dapat tercapai. Menurut Henry Mintzberg, strategi adalah *“ A pattern in stream of decisions or actions.”* Suatu pola dalam sebuah tindakan atau keputusan. Menurut Wikipedia, strategi adalah *“A long term plan of action designed to achieve a particular goal, most often “winning”.* Suatu perencanaan dalam sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, sering “berhasil”.

Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu : strategi sebagai PERSPECTIVE, strategi sebagai POSISI, strategi sebagai PERENCANAAN, strategi sebagai POLA kegiatan, dan strategi sebagai “PENIPUAN” (Ploy) yaitu muslihat rahasia. Sebagai perspective, dimana

²² <http://strategika.wordpress.com> diakses 17 Januari 2011

strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Menurut Daoed Yoesoef (1981) Studi Strategi dan studi hubungan internasional merupakan "lepat" dan "daun". Keduanya dapat dibedakan secara substansial namun sulit untuk dipisahkan. Ia menilai terwujudnya sesuatu strategi pada dasarnya melalui empat tahapan²³ :

1. Tahap Perumusan : perbuatan intelektual
2. Tahap Pemutusan : perbuatan politis
3. Tahap Pelaksanaan : perbuatan teknis
4. Tahap Penilaian : perbuatan intelektual

Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi dimasa depan. Menurut Daoed Yoesoef, tahap kedua yakni peralatan politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Peralatan ekonomi meliputi semua potensi ekonomi masyarakat.²⁴ Pada tahap ketiga, pengertian strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas.

1. Pengertian sempit, strategi diartikan sebagai seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik.
2. Secara luas strategi diartikan seni (art) menggunakan semua kekuatan untuk mencapai semua tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik. Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu itu adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan.

Dalam hal ini pemerintah Australia memanfaatkan kegiatan Interfaith Dialogue sebagai salah satu strateginya untuk lebih mendekatkan hubungan dengan pemerintah Indonesia. Dan diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antar kedua negara dan dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin akan terjadi.

F. Hipotesa

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, serta didukung dengan konsep diplomasi kebudayaan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisa permasalahan mengenai alasan kepentingan Australia menyetujui program Interfaith Dialog dengan Indonesia, maka hipotesanya adalah :

1. Bahwa pemerintah Australia menyetujui Interfaith Dialogue dengan Indonesia adalah sebagai pertimbangan yang rasional mengingat Indonesia adalah

tetangga Australia yang cukup dekat letaknya secara geografis sebagai Negara tetangga.

2. Dialog sebagai strategi Australia mendekatkan hubungan dengan Indonesia mengingat posisi Indonesia sangat penting keberadaannya bagi Australia dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan.

G. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu didasarkan pada kerangka pemikiran, kemudian ditarik suatu hipotesa dan akan dibuktikan melalui data-data empiris yang ada. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

H. Jangkauan Peneletian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan. Selanjutnya jangkauan penelitian mengenai KEPENTINGAN AUSTRALIA MENYETUJUI PROGRAM INTERFAITH DIALOGUE DENGAN INDONESIA, adalah mulai tahun 2001, yaitu pada mulai terjadinya terror bom di WTC 11 September 2001, dan awal pengajuan gagasan Interfaith Dialog oleh Menteri Luar negeri Indonesia pada 2002, sampai pada tahun 2011. Dan penulis tidak akan mengesampingkan data-data diluar jangkauan tersebut selama masih ada keterkaitan dan relevansinya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Politik Luar Negeri Australia. Bab ini akan menguraikan mengena Sejarah Politik Luar Negeri Australia, Dasar-dasar politik luar negeri Australia, politik luar negeri Australia terhadap ASEAN.

BAB III Gagasan Interfaith Dialog. Yang terdiri dari dua subjudul, yaitu; Pengertian dan Sejarah Interfaith Dialog, serta Tujuan dan sasaran Interfaith Dialog dan urutan kegiatan Interfaith Dialogue Australia dengan Indonesia.